

**PENGUATAN KELEMBAGAAN GOTONG ROYONG DALAM
PERSPEKTIF SOSIO BUDAYA BANGSA :**
Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
*Gotong Royong Institution Empowerment in the Perspectives of Nation Socio-
Culture: Tradition Revitalization Undertaking on Government Conduct*

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani 70 Bogor, 16161*

ABSTRACT

Gotong royong is social capital found in most of Indonesian sub-cultures. In *gotong royong* institution we find social values, collective spirit, mutual collective trust, and organization aimed at common progress. Roles of *gotong royong* are significant in alleviating Indonesian from undeveloped economy of basic needs and foreign dominance. *Gotong royong* institution revitalization is necessary to involve people through deep participation in order to implement good governance. Upper aspect of *gotong royong* is norms. It is possible to improve social structure through *gotong royong* both at local and national levels. Collective, focused movement of this institution enables the government to establish self-reliance society based on social justice. Therefore it needs political will from all stakeholders both at regional and central levels.

Key words: *custom revitalization, gotong royong institution, society, government, people progress*

ABSTRAK

Gotong royong bukan saja merupakan kekayaan sosio-budaya, melainkan juga "modal sosial" yang hampir secara merata dijumpai pada setiap sub-kultur masyarakat Indonesia. Dalam kelembagaan gotong royong terkandung unsur visi nilai kehidupan sosial ("ideologi"), spirit perjuangan kolektif, semangat saling menghargai (*mutual collective trust*), dan keorganisasian kerjasama yang kompatibel terhadap kemajuan masyarakat (bangsa). Tanpa kekuatan kelembagaan gotong royong, mustahil masyarakat Indonesia dapat melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi kebutuhan dasar, dominasi bangsa asing, serta penjajahan politik dari bangsa lain. Revitalisasi kelembagaan adat gotong royong dapat dijadikan wahana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (*deep participation*) dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Aspek hulu dari kekuatan gotong royong adalah tata-nilai yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Jika terhadap tata-nilai adat-istiadat dapat dilakukan pengembangan melalui prakayasaan sosio-politik yang terarah, maka melalui kelembagaan gotong royong dapat dibangun kompetensi SDM yang lebih baik, perubahan struktur masyarakat (ke arah yang lebih egaliter; tidak polaristik), manajemen sosial yang lebih sehat, serta kepemimpinan sosio-politik yang merepresentasikan kemajuan bersama baik dalam tingkat komunitas lokal maupun nasional. Gerakan kolektif dalam penguatan kelembagaan gotong royong secara terarah akan memudahkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemandirian (masyarakat) bangsa yang dilandaskan pada keadilan sosial. Berkaitan dengan itu dibutuhkan dukungan kemauan politik ("*political will*") yang kuat dari kalangan elit kepemimpinan pemerintahan, partai politik, masyarakat adat, serta masyarakat bisnis di tingkat daerah dan pusat.

Kata kunci : *revitalisasi adat-istiadat, kelembagaan gotong royong, masyarakat, pemerintahan, kemajuan bangsa*

PENDAHULUAN

Penguatan dan revitalisasi masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian awal dan

penentu kemajuan dan keberlanjutan keberadaan Bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia di masa datang. Selain ditempuh melalui revitalisasi nilai-nilai adat istiadat pada masyarakat, penguatan kelemba-

gaan gotong royong pada masyarakat adat di Indonesia merupakan pintu masuk yang sangat strategis bagi pemberdayaan masyarakat adat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Adat istiadat yang ada pada masyarakat suku bangsa di Indonesia merupakan elemen esensial modal sosio budaya untuk membentuk kekuatan kelembagaan gotong royong di tingkat komunitas, masyarakat adat dan masyarakat lintas adat (atau) Bangsa Indonesia.

Istilah gotong royong sangat akrab dalam kosa kata masyarakat adat maupun keseluruhan bangsa Indonesia. Hampir setiap masyarakat adat mempunyai istilah yang mempunyai padanan dengan kelembagaan "gotong royong". Sebagai contoh, pada masyarakat Jawa dikenal dengan semangat dan kelembagaan *holo pis kuntul baris*; pada masyarakat Maluku dikenal dengan *pela gandhong*; pada masyarakat Tapanuli dikenal istilah *dalihan-nan-tolu* (Siahaan, 1984); dan pada masyarakat Minahasa dikenal istilah *mapalus*. Dari tulisan ini diharapkan dapat lebih dipahami mengenai hubungan antara konsep "gotong royong" dan sosio-budaya di satu sisi, juga hubungan antara konsep "gotong royong" dan revitalisasi adat istiadat di sisi yang lain. Revitalisasi adat istiadat, dikaitkan dengan upaya menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar, kuat dan dihormati dalam pergaulan masyarakat dunia perlu mengungkit kembali elemen "gotong royong" sebagai kelembagaan yang strategis dalam perspektif sosio budaya.

Makna pemberdayaan melalui penguatan kelembagaan "gotong royong" pada masyarakat adat hanya mungkin dipahami jika dilihat dari perspektif sosio budaya bangsa Indonesia. Dalam budaya Jawa istilah gotong royong dekat dengan semangat rukun. Istilah "*rukun agawe santoso, crah agawe bubrah*" (rukun dan bersatu akan membawa kejayaan, sedangkan perpecahan akan membawa kehancuran) dikenal dalam kegotong-royongan pada masyarakat desa dan adat. Belum ada padanan yang pas, misalnya dalam Bahasa Inggris, untuk merumuskan pengganti istilah "gotong royong". Istilah "*self help*" yang digunakan pakar masyarakat pedesaan, misalnya Kortén (1990), belum sepenuhnya dapat menjelaskan makna "gotong royong". Dalam istilah "gotong royong" paling tidak

merangkum empat makna sekaligus, yaitu: *collective action to struggle, self governing, common goals, dan sovereignty*.

Para pakar sosial (mencakup ekonomi, politik, dan budaya) telah berusaha merumuskan faktor adat istiadat atau sosio budaya ("*intangible factors*"), di luar faktor budaya material antara lain modal finansial, prasarana, dan alam, yang dapat menjelaskan mengapa satu masyarakat dapat berkembang relatif cepat dan menjadi lebih kuat dibanding masyarakat lain. Dari observasi masyarakat lintas bangsa dan sejarah telah diperoleh penjelasan bahwa suatu masyarakat, misalnya Korea Selatan (Harrison and Huntington, 2000), melaju lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat (bangsa) lain (misalnya Ghana). Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor sosio budaya yang ada dalam masyarakat yang menentukan perkembangan masyarakat. Hanya saja, faktor sosio budaya seperti apa yang dapat menjelaskan hal tersebut, hal itu masih menjadi "misteri" (Chen, 2003) yang belum sepenuhnya terungkap.

PEMBERDAYAAN ("GOTONG ROYONG") MASYARAKAT ADAT

Awal dibentuk dan dikembangkannya NKRI tidak dapat dilepaskan dari penguatan masyarakat adat yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Jika saja para tokoh visioner, yang menginginkan terbentuknya Bangsa Indonesia yang kuat dan bebas dari bayang-bayang kekuasaan atau hegemoni sosio budaya bangsa lain, tidak memiliki visi untuk merevitalisasi adat istiadat pada masyarakat adat maka hampir dapat dipastikan bahwa "Indonesia Merdeka" hanya akan sebatas impian kosong. Mengikis mental *inlander complex* tidak dapat dilakukan sebagai pekerjaan sambil lalu, melainkan bagian pekerjaan berat dari pengembangan mental bangsa. Pekerjaan seperti ini dikenal sebagai pembangunan karakter bangsa atau *national character building* (NCB). Dalam kerangka NCB ini pada 1945 Soekarno mempopulerkan istilah gotong royong, sebagai bagian esensial dari revitalisasi nilai sosio budaya dan adat istiadat pada masyarakat lintas suku bangsa di Indonesia agar terbebas dari dominasi sosial,

ekonomi, politik, serta ideologi asing yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia.

Keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak mungkin dicapai tanpa dukungan kekuatan masyarakat adat yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Berkaitan dengan ini, kekuatan “gotong royong” antar masyarakat adat lah yang memperkuat energi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, seperti halnya pada diri Bung Karno dan Bung Hatta. Jauh sebelum merdeka, istilah gotong royong merupakan kekuatan sinergis antar masyarakat adat yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam perspektif wawasan kebangsaan, pemberdayaan masyarakat adat adalah identik dengan penguatan semangat “gotong royong” pada masyarakat lintas adat di Indonesia.

Telah dikenal luas bahwa Soekarno (1964) menyebut kata “gotong royong” sebagai perasan dari dasar negara Pancasila, yang nilai-nilainya digali dari sejarah dan adat istiadat bangsa Indonesia. Tidaklah berlebihan Soekarno menyebut demikian, karena semangat dan institusi “gotong royong” telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari pada hampir seluruh suku bangsa atau masyarakat adat yang ada di wilayah Nusantara. Gotong royong juga dapat disebut sebagai inti “kekuatan budaya” masyarakat adat di Indonesia, dan dapat dijadikan landasan semangat dan tindakan kolektif untuk merevitalisasi adat istiadat bangsa. Dengan semangat dan tindakan gotong royong ini pula bangsa Indonesia mempunyai keyakinan untuk memerdekakan dirinya dari penindasan oleh bangsa lain. Istilah gotong royong juga pernah dijadikan sebutan formal Kabinet di Indonesia periode 2001-2004 (“Kabinet Gotong Royong”).

Pemberdayaan masyarakat adalah identik dengan penguatan kelembagaan gotong royong pada masyarakat adat di Indonesia. Gotong royong berarti bahu-membahu, saling bergandengan tangan, atau memikul beban secara bersama sebagai bagian dari pemberdayaan diri secara kolektif untuk menyelesaikan atau mengatasi suatu persoalan, dan sekaligus juga untuk menggapai tujuan tertentu yang bersifat mulia (“*virtue*”). Dari segi perjuangan gotong royong adalah pembantingan tulang dan pemerasan keringat bersama dalam suatu usaha untuk tujuan mulia.

Dalam perspektif merevitalisasi adat istiadat untuk pembangunan bangsa maka pemaknaan istilah gotong royong terkait dengan pernyataan berikut “... bahwa Indonesia didirikan bukan hanya untuk orang Jawa atau untuk muslim saja, tetapi Indonesia untuk Indonesia ... semua untuk semua...”. Penggunaan istilah gotong royong terkait dengan pemberdayaan masyarakat; bergotong royong berarti melakukan pemberdayaan secara internal dalam diri masyarakat.

Istilah gotong royong ini diambil dari Bahasa Jawa dalam etnis Jawa juga dikenal istilah *gugur gunung* atau *lir gumanti* yang memiliki makna sepadan dengan gotong royong, dan istilah ini memiliki makna tidak beda dengan (misalnya) *Mapalus* (Minahasa) atau *dalihan-na-tolu* (Tapanuli) atau *pela gandhong* (Maluku). Makna gotong royong juga dapat ditemui secara diperluas, misalnya *segi tiga tungku* (jalinan adat, agama dan aparat pemerintah). Hal ini menunjukkan bahwa dalam khasanah adat istiadat di Indonesia akan banyak ditemui keragaman istilah (menurut istilah etnis atau suku bangsa setempat) namun dengan makna relatif sama. Keragaman istilah dengan makna tidak berbeda menunjukkan bahwa pada bangsa Indonesia secara sosio budaya dikenal (istilah atau) semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan semangat gotong royong atau *holo pis kuntul baris* (istilah Jawa) negara Indonesia ditegakkan kembali dan roda pemerintahan dijalankan. Jika setiap golongan (etnis, adat, agama, atau sosial lainnya) menganggap diri lebih kuat atau lebih penting dari yang lain, maka saat itulah semangat gotong royong tidak dapat dijalankan dengan baik. Esensi gotong royong terkandung makna kesetaraan, keadilan dan kebersamaan dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Dari perspektif ini, pemaknaan gotong royong mencakup bahwa dalam masyarakat Indonesia sudah terkandung makna adanya modal sosial dan budaya (*social capital*) dan masyarakat madani (*civil society*). Dapat dikatakan bahwa istilah gotong royong adalah substansi isi (“*old wine*”), sedangkan penggunaan frasa *social capital* dan *civil society* adalah pengemasan baru (“*new bottle*”) dari kekayaan adat istiadat kita.

Dari observasi dan telaah pustaka telah banyak dijumpai masyarakat (negara) yang

hanya sedikit menguasai aset material (dan sumber daya alam) namun dapat berkembang relatif cepat, misalnya Korea Selatan atau Jepang di satu sisi serta Ghana di sisi yang lain. Perkembangan dua masyarakat bangsa ini lebih cepat dan bahkan melebihi masyarakat (negara) lain yang semula jauh lebih maju dan menguasai aset material lebih banyak. Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengenai pentingnya revitalisasi faktor adat istiadat (pada masyarakat adat di Indonesia) atau modal sosio budaya untuk pemberdayaan masyarakat adat dan pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Sebagai adat istiadat (dan sekaligus) modal sosial budaya yang ada pada masyarakat adat, kelembagaan gotong royong bukan saja merupakan elemen esensial yang bersifat dinamik bagi terwujudnya persatuan atau solidaritas antar masyarakat adat di Indonesia, melainkan juga sebagai pintu masuk pemberdayaan masyarakat melalui penguatan “energi” kolektif masyarakat lintas adat di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat berbasis revitalisasi adat istiadat ini seharusnya dipandang sebagai perjuangan “berat di tingkat hulu” bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan (dari penjajahan bangsa asing). Pemberdayaan ini juga sangat relevan untuk upaya mengisi era kemerdekaan dan mempertahankannya, serta dalam mengelola dinamika sosial-politik-budaya-ekonomi dan keamanan bangsa Indonesia ke depan.

MODAL SOSIO BUDAYA MASYARAKAT ADAT

Hampir dapat dipastikan bahwa sendainya saja bangsa Indonesia tidak mempunyai kekuatan adat istiadat atau sosio budaya yang khas pada masyarakat adat, yang antara lain disimbolkan dalam semboyan gotong royong dalam ke-Bhinneka-an (Tunggal Ika), sangatlah mungkin kehadiran bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia hari ini hanya tersisa dalam catatan sejarah. Mengikuti pendapat Grootaert (1998) dapat dikatakan bahwa masyarakat (bangsa) yang tidak mampu membangun, mengembangkan dan memelihara modal sosial budayanya adalah masyarakat bangsa

yang “sangat sial”. Dapat dikatakan bahwa timbul (*rise*) dan tenggelamnya (*fall*) suatu bangsa adalah sangat tergantung pada kemampuan bangsa tersebut dalam membangun atau merivitalisasi adat istiadat dan kekuatan sosio budayanya.

Patutlah disyukuri bahwa secara historis dan geografis, bangsa Indonesia seakan-akan telah ditakdirkan hanya dapat hidup dan berkembang secara mandiri dengan kekuatan adat istiadat dan sosio budayanya sendiri. Kekayaan adat istiadat atau sosio budaya yang terbangun di bumi Indonesia tidak dapat diharapkan begitu saja turun dari langit. Kekayaan sosio budaya yang berkembang selama ini merupakan hasil perenungan dan pergulatan imajinasi yang sangat arif dari tokoh atau pemuka-pemuka masyarakat yang tersebar di berbagai pulau besar, kecil dan kepulauan di segala penjuru wilayah Nusantara. Tidak terkecuali hal ini juga dilakukan oleh generasi para *founding fathers* bangsa Indonesia pada awal abad 20 dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang besar, kuat dan terhormat. Di tengah-tengah perjalanannya, kekayaan adat istiadat dan sosio budaya ini seakan-akan tidak pernah sirna dan hampir selalu menjadi “dewa penolong” bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai krisis multi-dimensi di tingkat nasional maupun lokal.

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak “usia remaja” (16-30 tahun) hingga “tua” (63 tahun), telah diterpa berbagai “badai” krisis multi dimensi akibat pertarungan hegemoni ekonomi, sosial dan politik, serta bencana alam yang tidak ringan. Sebagai gambaran, pada penggalan awal kemerdekaan hingga akhir 1960-an, secara politik bangsa Indonesia berada dalam jepitan pertarungan hegemoni dua “ideology bi-polar” negara adidaya; yaitu di antara ideologi individualisme-kapitalisme-liberal di satu sisi, dan sosialisme-Marxisme-atheisme di sisi yang lain. Dengan tetap mengandalkan kekuatan adat istiadat dan sosio budaya yang khas, bangsa Indonesia berhasil melewati “masa yang mematikan” dari kancah pertarungan “perang dingin” dua peradaban dan ideologi besar dunia yang sangat pragmatis. Dengan kesadaran akan kekuatan multi budaya, yang dibingkai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia selalu berusaha untuk tetap

melangkah dengan tegap dan optimis menatap ke depan.

Di tengah masih simpang-siurnya mengenai ramalan masa depan peradaban manusia dalam memasuki abad 21, masih menyisakan pertanyaan ulang yang serius “faktor apakah yang mendasari maju, mundur, dan dapat bertahannya suatu masyarakat atau bangsa?”. Harrison (2000) dan Huntington (2000), dalam bukunya berjudul “*Culture Matters: How Values Shape Human Progress*” mengetengahkan jawaban atas pertanyaan tersebut, bahwa aspek adat istiadat atau sosio budaya sebagai faktor fundamental atau modal utama ketahanan dan kemajuan suatu bangsa. Pendeknya, jika suatu bangsa tidak mempunyai modal sosio budaya (*social capital and culture*) yang khas dan kuat (Fukuyama, 2000), maka bersiap-siaplah bangsa tersebut akan terhapus dari catatan peradaban bangsa-bangsa besar di dunia.

Mencermati sejarah didirikannya negara (bangsa) Indonesia secara kilas balik (*flash back*), dapat dikatakan bahwa kelahiran bangsa Indonesia tidak didasarkan pada kekuatan material, misalnya kekuatan senjata atau ketersediaan bantuan modal asing. Secara historis telah teruji bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kekuatan adat istiadat dan modal sosio budaya yang sudah ada dan telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh visioner bangsa Indonesia pada beberapa abad sebelumnya. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tradisi dikembangkannya nilai-nilai sosio budaya bangsa pada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di wilayah Indonesia bagian barat dan timur.

Tradisi mengolah kekuatan adat istiadat, sebagai kekuatan yang “misterius” dalam masyarakat adat, secara alamiah maupun melalui rekayasa sosio budaya terus berlanjut hingga sekarang. Masuknya adat istiadat masyarakat asing, melalui pertarungan memperebutkan hegemoni perdagangan yang untuk sementara dimenangkan oleh orang-orang Eropa (antara lain Portugis, Belanda, dan Inggris) di wilayah Nusantara pada rentang abad 16-19, secara historis memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kekuatan modal sosial-budaya pada masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak dapat dianggap telah matang dan

tidak perlu diubah (termasuk diperkuat). Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia ke depan yang lebih mandiri dan terhormat harus dimulai melalui revitalisasi adat istiadat atau pemberdayaan masyarakat adat.

PENGUATAN MASYARAKAT BANGSA

Dapat dikatakan hampir tidak mungkin Indonesia dapat memerdekakan diri jika sebelumnya tidak mempunyai modal yang kuat berupa adat istiadat atau sosio budaya kebangsaan yang kuat, terutama di kalangan *founding fathers*. Sejak awal abad 20, para *founding fathers*, walaupun umumnya telah mendapat didikan dari ilmu pengetahuan bangsa barat, sangat memahami bahwa potensi untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar adalah pada kandungan kekuatan adat istiadat dan sosio budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat suku dan adat bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Hasil perenungan dan pergulatan imajinasi yang dilakukan para *founding fathers* dalam mewujudkan wawasan kebangsaan juga sejalan dengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar pada 4-5 abad (seperti Gajah Mada dan para Wali Songo) sebelumnya.

Impian (“utopia”) yang akan diwujudkan oleh para *founding fathers* adalah lahirnya bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia yang besar dan terhormat dalam pergaulan masyarakat dunia. Disebut “besar” bukan dilihat dari ukuran jumlah penduduk atau wilayah geografisnya, melainkan dilihat dari misi kemanusiaan dan terwujudnya tatanan masyarakat dunia yang berkeadilan sosial. Disebut “terhormat” bukan dimaksudkan untuk membangun kesombongan diri dan sikap *chauvinistic*, melainkan dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun kehidupan manusia (“masyarakat”) yang beradab dan berakhlak mulia (“terhormat”). Nilai kebesaran atau kehormatan suatu bangsa tidak hanya diukur melalui indikator kemajuan budaya material, melainkan dari ketinggian budaya non-material yang dicapai; mencakup ditegakkannya keadilan.

Dari pengalaman selama tiga dekade terakhir, antara 1969-1998, dapat ditunjukkan bahwa untuk membangun kembali kejayaan

bangsa Indonesia ternyata tidak cukup dengan (misalnya) mengedepankan kemajuan budaya material (*material culture*). Lebih ekstrim lagi, jika hal itu ditempuh hanya dengan mengandalkan pemacuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang bersifat jangka pendek, maka dapat berakibat serius terhadap kerusakan sosio budaya bangsa. Dengan tergerusnya kekuatan sosio budaya (*non-material or socio-culture*) bangsa; antara lain berupa melemahnya nilai-nilai keadilan (dan anti korupsi), solidaritas (dan kerukunan sosial), serta harga diri (dan kemandirian) bangsa; ternyata telah membawa akibat sangat serius.

Dengan menekankan pada pendekatan kemajuan di bidang budaya material yang dipaksakan, pada 1998 hampir menjadi “bumerang” dan akan meruntuhkan sistem ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Sebagai gambaran, memaksakan kemajuan melalui pemacuan pertumbuhan ekonomi (rata-rata 7 % per tahun atau lebih) dengan mengandalkan bantuan asing (dengan cara menghutang) dan menguras sumber daya alam, mencakup melalui tambang dan hutan, ternyata mengundang prahara krisis moneter (1998) dan “krisis ekonomi” (2008). Krisis tersebut menghasilkan efek bola salju (*snowball rolling effect*) dan dengan cepat ditransformasikan menjadi krisis multi dimensi yang hampir saja meruntuhkan eksistensi dan kehormatan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar.

Kekhasan adat istiadat dan kekuatan sosio-budaya bangsa Indonesia ini sangat dipahami para *founding fathers*, sehingga dalam merumuskan dasar negara tidak dengan serta merta menjiplak aspek adat istiadat dan sosio budaya yang ada pada bangsa-bangsa lain (besar) yang pada waktu itu sudah mapan. Para *founding fathers* tidak menjiplak begitu saja kekuatan sosio budaya yang ada pada masyarakat kapitalis liberal (“Barat”) ataupun sosialis (“Timur”). Pada saat yang hampir bersamaan pun telah berkembang sosio budaya yang khas pada bangsa-bangsa Asia, seperti halnya yang terjadi pada bangsa Cina, India, Korea, Jepang, dan beberapa negara Timur Tengah (antara lain: Iran dan Mesir). Pendeknya, suatu bangsa yang (lebih memilih) mengimitasi adat istiadat atau aspek sosio budaya atau menjadi

sub-ordinat sosio budaya dari bangsa lain; niscaya akan mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi bangsa besar yang kuat, mandiri dan disegani bangsa-bangsa lain dalam pergaulan masyarakat dunia.

Berpijak dari pengalaman di atas, dalam melewati periode-periode sangat kritis, misalnya pada tahun 1965 (G30S-PKI) dan 1998 (menjelang kelahiran Reformasi), perkembangan bangsa (*the critical period of the survival of Indonesia as a big nation*) diselamatkan oleh masih adanya kekuatan sosio-budaya yang berisi elemen adat istiadat dan budaya yang masih ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dapat dikemukakan bahwa pada adat istiadat dan kekuatan sosio budaya inilah terletak ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai hambatan, tantangan, dan ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Kemampuan bangsa Indonesia dalam menghadapi badai “krisis keuangan global” yang dipicu “krisis kemacetan kredit perumahan di Amerika Serikat” akhir-akhir ini juga tidak dapat dilepaskan dari masih berfungsinya wawasan kebangsaan yang berisi kekuatan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

REVITALISASI ADAT ISTIADAT DAN SOSIO BUDAYA BANGSA

Faktor sosio budaya berisi 2 (dua) elemen atau lebih yang bersifat komposit. Dengan kata lain faktor sosio budaya bukan merupakan elemen tunggal, melainkan di dalamnya terkandung beberapa elemen sekaligus. Menurut Pranadji (2004) ada 6 (enam) elemen strategis yang menyusun kekuatan sosio budaya masyarakat (bangsa), yaitu: (1) kompetensi SDM, (2) nilai-nilai adat istiadat, (3) struktur masyarakat, (4) kepemimpinan, (5) manajemen sosial, dan (6) sistem penyelenggaraan pemerintahan. Jika suatu masyarakat ingin maju dengan cepat dan mantap, maka keenam elemen tersebut harus ada secara bersamaan. Namun jika dicermati secara mendalam, maka satu elemen memiliki kekuatan khusus. Menurut Pranadji (2004, 2008) dan Harrison dan Huntington (2000), peran nilai-nilai adat istiadat atau sosio budaya bangsa paling menentukan kemajuan suatu keluarga,

masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pencermatan dan penguatan terhadap nilai-nilai adat istiadat atau sosio budaya bangsa yang bersifat spesifik.

Berkaitan dengan penguatan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia ke depan, ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu dicari jawabannya: “mengapa dahulu bangsa Indonesia mempunyai kehormatan tinggi dan sangat disegani dalam pergaulan masyarakat dunia?” Pertanyaan sekarang ini: “mengapa bangsa Indonesia kini terpuruk?” (Dari dalam sendiri tampak gejala runtuhnya “kepercayaan diri” secara kolektif sebagai bangsa). Pertanyaan dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia ke depan: “nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang seperti apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terhormat?” Ketiga pertanyaan di atas harus dilihat dalam rangkaian perubahan pendekatan penerapan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya bangsa.

Jawaban pertanyaan pertama adalah bahwa pada awal kemerdekaan prioritas pembangunan ditekankan pada pengembangan karakter bangsa atau *national character building* (NCB). Dengan menekankan pada NCB, selama sekitar dua dekade setelah merdeka bangsa Indonesia dikenal memiliki adat istiadat berupa nilai-nilai dan semangat kebangsaan yang bisa dijadikan modal awal untuk menjadi bangsa besar, walaupun saat itu kemajuan di bidang material dan ekonomi tergolong sangat rendah. Nilai yang mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia adalah terpompanya harga diri bangsa, sehingga sebagai bangsa yang baru saja lepas dari penjajahan sudah bisa berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang sudah lama merdeka. Harga diri ini kemudian diikuti dengan upaya menegakkan kemandirian yang tinggi, atau paling tidak menjauhkan diri dari mental “pengemis” bantuan dari negara luar. Seluruh aktivitas pembangunan sejauh mungkin dijalankan berdasar kemampuan sendiri, misalnya dengan menegakkan semangat berdikari dalam membangun sistem produksi dalam negeri, mirip swadesi yang dilakukan di India.

Penggunaan slogan atau pernyataan utopia (Manheim, 1991) dalam rangka mengaktifkan implementasi suatu program (politik)

secara massal sangat diperlukan. Slogan berdikari ini, misalnya, bukan saja bisa dijadikan pedoman kerja pemerintah, melainkan juga bisa dijadikan bagian dari semangat seluruh komponen bangsa dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan kenegaraannya. Saat itu sekan-akan telah terbangun nilai empati yang tinggi antar sesama anak bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Dengan nilai itu bukan saja bisa ditegakkannya semangat tidak ingin terikat dengan bantuan asing, namun juga disadari tentang pentingnya membangun semangat gotong-royong (“persatuan”) dari segenap elemen bangsa sebagai modal sosial budaya utama membangun negara bangsa.

Jawaban pertanyaan kedua bahwa sebelum proses NCB selesai, bangsa Indonesia terlalu cepat atau terjebak masuk dalam pembangunan berbasis material atau pemacuan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan bantuan atau utang luar negeri yang sangat mengikat. Semangat menegakkan kemandirian politik dan ekonomi, yang dijadikan program utama pemerintah 1945-1965, secara tiba-tiba (“revolusioner?”) diganti dengan program pemacuan pertumbuhan ekonomi yang mengandung semangat “mengemis” pada bantuan asing atau “rendah diri” terhadap bangsa lain. Sepertinya elit politik dan penyelenggara negara sudah sangat tidak sabar untuk menikmati hasil kemerdekaan, dan memonopoli banyak hal untuk segera mewujudkan keinginan pribadi atau kelompoknya. Penerapan pendekatan stabilitas dan keamanan secara berlebihan oleh pemerintah, yang dianggap sebagai syarat utama pertumbuhan ekonomi, telah menimbulkan efek kontra produktif terhadap PNSB dan NCB. Lembaga komunal yang hidup dari nilai-nilai lokal tingkat desa dan dukuh banyak yang mati karena pendekatan stabilitas dan sistem pemerintahan yang monolitik (Tjondronegoro, 1977; dan Pranadji, 2003).

Sentralisme kekuatan politik yang kurang dilandaskan pada pemahaman tentang pentingnya PNSB menjadikan nilai budaya konsumtif atau materialisme dan korupsi berkembang tidak terkendali. Dengan kata lain budaya materialisme ini bukan saja menjadi nilai-nilai aktual yang banyak dijalankan elit politik dan pemerintah secara hampir telan-

jang, namun nilai aktual ini juga sangat mendistorsi gerakan PNSB dan NCB. Konflik antar elemen bangsa yang menjurus pada gejala disintegrasi adalah akibat terhambatnya proses NCB dan berkembangnya *mutual social distrust* yang berawal dari penyimpangan elit politik dan pejabat pemerintah yang tidak mendapat penanganan secara lugas. Pelaksanaan hukum, sebagai benteng formal untuk mengatasi korupsi, dipaksa tunduk pada kemauan "pribadi" pucuk pimpinan negara (Crough, 1988 dan Muhaimin, 1980).

Jawaban pertanyaan ketiga adalah bahwa paling tidak ada 4 (empat) kelompok nilai (komposit) adat istiadat yang bisa mengarahkan bangsa Indonesia sebagai bangsa besar di masa datang, yaitu: *pertama*, kelompok nilai (adat istiadat) yang bisa dijadikan pembangkit semangat kolektif bangsa untuk mandiri di bidang produksi barang-barang kebutuhan dasar manusia. Mengatasi kemiskinan dan kelaparan tercakup dalam kelompok nilai ini. *Kedua*, kelompok nilai yang bisa mengarahkan dan menjadikan bangsa Indonesia secara kolektif memiliki daya saing tinggi di bidang ekonomi, politik dan keamanan. Daya saing bangsa seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok nilai ini. *Ketiga*, kelompok nilai yang bisa membangkitkan solidaritas atau kesatuan bangsa secara lintas etnis/agama/golongan dan generasi. Demokrasi berbasis pluralisme seyogyanya bisa dibangkitkan melalui kelompok ini. *Keempat*, kelompok nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak hidup generasi mendatang. Dalam kaitan ini, kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya simbol "kemenangan" masyarakat Indonesia, melainkan sekaligus sebagai kemenangan peradaban masyarakat dunia di masa datang yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan manusia.

NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT

Di muka telah dijelaskan mengenai pentingnya penguatan adat istiadat dan faktor sosio budaya dalam perkembangan suatu bangsa. Pranadji (2005) menyebutkan bahwa dalam sosio budaya masyarakat (bangsa) terkandung nilai-nilai adat istiadat, baik yang

sedang dijalankan sehari-hari (*das sein*) maupun yang (seharusnya, *das sollen*) diidealkan terdapat dalam suatu masyarakat yang selalu mendambakan kemajuan. Menurut Pranadji (2005) terdapat 12 (dua belas) elemen pembentuk nilai-nilai adat istiadat dan sosio budaya masyarakat maju, yaitu: (1) rasa malu dan harga diri, (2) kerja keras, (3) rajin dan disiplin, (4) hidup hemat dan produktif, (5) gandrung inovasi, (6) menghargai prestasi, (7) menghargai cara berpikir sistematis dan cara kerja terorganisir, (8) memiliki daya empati tinggi, (9) rasional dan impersonal dalam pengambilan keputusan, (10) sabar dan syukur, (11) amanah dan jujur, dan (12) bervisi jangka panjang.

Dalam sejarah kemajuan Eropa Barat, Max Weber (*"Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism"*) telah memperkenalkan nilai kerja keras sebagai "ibadah" dan sekaligus faktor penjelas mengapa suatu masyarakat atau bangsa bisa berkembang lebih maju dibanding masyarakat atau bangsa lain. Jika indikator kemajuan tidak semata-mata kemajuan budaya material, misalnya besarnya nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), melainkan mencakup juga (misalnya) aspek penghormatan terhadap masyarakat lain, terciptanya keadilan, kesatuan ("solidaritas") bangsa, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang, maka mengandalkan nilai kerja keras saja untuk kemajuan masyarakat tidak lagi dinilai memadai. Penerapan nilai lain, misalnya nilai rasa malu yang tinggi, seperti yang dianut dalam kehidupan masyarakat Jepang, tidak kalah pentingnya dibanding penerapan nilai kerja keras.

Kemajuan suatu bangsa juga perlu dijelaskan dari apakah nilai (seperti) rajin, menghargai prestasi, menjunjung tinggi penggunaan cara berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan persoalan, menempatkan visi ke depan sebagai pedoman bersama dalam bertindak, dan menjunjung tinggi sifat amanah (*hingham trust*) atau kejujuran telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari bangsa tersebut. Besarnya investasi atau masuknya modal asing, secara sosiologis, bukan penyebab utama kemajuan suatu bangsa; melainkan lebih cocok ditempatkan sebagai indikator atau salah satu instrumen untuk memprediksi kemajuan ekonomi suatu

bangsa. Ketidak-majuan ekonomi bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir bukan disebabkan tidak adanya investasi masuk dari luar, melainkan lebih disebabkan tidak efisiennya pengelolaan investasi tersebut. Budaya korupsi yang meluas merupakan indikator betapa sangat tidak efisiennya keorganisasian negara dalam mengelola investasi dari luar, terutama yang bersumber dari pinjaman luar negeri.

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sejumlah nilai adat istiadat apa saja yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari bangsa tersebut, setidaknya ada 12 (dua belas) nilai adat istiadat dan sosial budaya atau NSB (Tabel 1). Masing-masing dari 12 NSB bisa dihubungkan dengan 4 (empat) komponen atau kumpulan NSB yang membentuk bingkai (nilai) kemajuan bangsa. Hubungan antara NSB dan bingkai kemajuan bangsa dapat dilihat pada Tabel 2. Tampak bahwa nilai-nilai dasar yang ada dalam adat istiadat bangsa Indonesia dapat untuk membangkitkan rasa malu dan harga diri, kerja keras, rajin dan hidup hemat merupakan sekumpulan nilai (atau nilai komposit) yang berperan dalam kemajuan bangsa. Nilai-nilai (adat istiadat) dasar lain yang juga penting ditegakkan adalah yang berkaitan dengan penerapan berpikir sistematis, rasional, serta sabar dan syukur. Nilai amanah bisa dipandang sebagai kombinasi antara nilai rasa

malu dan harga diri, berpikir sistematis, empati tinggi dan visi jangka panjang.

Penerapan nilai-nilai untuk kemajuan harus memiliki konsistensi sejak tingkat individu atau keluarga, komunitas kecil hingga kolektivitas bangsa. Jika penerapan nilai atau sejumlah nilai tidak konsisten mengikuti tingkatan pelaku sosial, maka akan terjadi sejumlah distorsi terhadap kemajuan bangsa. Bisa terjadi pada tingkat individu atau keluarga nilai kerja keras berhasil diterapkan, namun penerapan nilai empati atau rasa malu dikesampingkan. Secara individu atau keluarga seseorang bisa maju, namun keberadaan seorang individu atau keluarga tersebut pada akhirnya justru membahayakan keberadaan komunitas kecilnya atau bahkan bangsanya. Sebagai contoh, seorang koruptor bisa jadi adalah seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai (adat istiadat) kerja keras, namun tidak menjunjung tinggi rasa malu, amanah dan empati. Keberadaan seseorang ini dalam sistem masyarakat besar atau bangsa cenderung membahayakan.

Mengikuti pendapat Blau (1967), kemungkinan terjadinya NSB di tingkat masyarakat bangsa mendistorsi perkembangan NSB di tingkat individu atau keluarga sangat terbuka. Legitimasi nilai yang secara sepihak dipaksakan dari atas akan membuat ruang gerak dan kreativitas individu tidak bisa berkembang secara wajar. Bagaimanapun

Tabel 1. Perbandingan Nilai-nilai Adat Istiadat yang Mencerminkan Kemajuan dan Keterbelakangan Komunitas Keluarga, Masyarakat Adat, dan Bangsa

Nilai-nilai adat istiadat untuk kemajuan	Tingkatan pelaku sosial			Nilai-nilai adat istiadat terbelakang
	Komunitas keluarga	Komunitas adat	Masyarakat bangsa	
Rasa malu & harga diri				<i>Rai gedheg</i> & rendah diri
Kerja keras				Kerja lembek
Rajin dan disiplin				Malas dan seenaknya
Hidup hemat dan produktif				Boros dan konsumtif
Gandrung inovasi				Resisten inovasi
Menghargai prestasi				Askriptif/primordial
Sistematis dan terorganisir				Acak dan difuse
Empati tinggi				Antipati tinggi
Rasional/impersonal				Emosional/personal
Sabar dan syukur				Pemarah dan penuntut
Amanah (<i>high trust</i>)				Tidak bisa dipercaya
Visi jangka panjang				Visi jangka pendek

juga NSB di tingkat masyarakat bangsa tetap perlu dibangun, paling tidak (misalnya) untuk mengatasi berkembangnya nilai-nilai (adat istiadat yang bersifat) permisif di tingkat individu yang tanpa kendali. Maraknya kritik berbagai kalangan terhadap pembuatan dan peredaran film "porno" dan "budaya kekerasan" akhir-akhir ini bisa dipandang sebagai bagian dari proses PNSB yang tidak datang dari pemerintah. Menghidupkan nilai-nilai adat istiadat yang mengarah pada penolakan kehidupan maksiat, peredaran minuman keras dan penggunaan obat-obatan terlarang bisa dipandang sebagai proses pengembangan PNSB yang muncul dari masyarakat. Terbukanya iklim kebebasan sedikit banyak bisa menjadi "jembatan" atau mekanisme alamiah PNSB yang berakar dari adat istiadat masyarakat Indonesia.

Saling mendistorsi antar NSB juga bisa terjadi pada komunitas kecil yang tidak konsisten dengan masyarakat bangsa. Sebagai gambaran, suatu komunitas kecil bisa jadi telah mengawali atau telah mencerminkan penerapan nilai kemajuan yang tinggi, karena tertanam dan dijalankannya nilai kerja keras dalam kehidupannya sehari-hari. Namun tanpa tertanamnya rasa malu, empati tinggi, memikirkan (akibat) jangka panjang dan amanah dalam hubungannya dengan komunitas lain; maka keberadaan komunitas kecil tersebut dalam sistem masyarakat setingkat bangsa

akan berbahaya bagi kelangsungan bangsa tersebut. Pendeknya, masyarakat bangsa Indonesia akan maju jika menerapkan secara konsisten sebagian besar atau seluruh NSB pada seluruh tingkat pelaku sosialnya. Penerapan NSB secara sepotong-sepotong bukan saja tidak akan efektif, namun juga secara mutualistik bisa menimbulkan efek kontra produktif.

Dalam kaitan dengan fungsinya terhadap kemajuan bangsa, masing-masing NSB tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai contoh, nilai (adat istiadat) yang menjunjung tinggi rasa malu & harga diri memiliki hubungan erat dengan nilai kerja keras, rajin, empati tinggi, amanah (*high trust*) dan visi jangka panjang. Gabungan beberapa NSB sekaligus akan bisa membentuk nilai komposit bangsa, misalnya berupa produktivitas, keadilan dan kehormatan, solidaritas dan keberlanjutan bangsa. Komponen nilai komposit yang mengandung pentingnya menempatkan visi jangka panjang sebagai pedoman hidup bangsa akan bisa menggiring ditegakkannya nilai sabar dan syukur, amanah, berpikir sistematis, empati tinggi, menghargai prestasi, kerja keras dll. Nilai komposit yang khas adalah untuk membangun kekuatan bangsa secara berkelanjutan. Kekuatan nilai komposit atau interaksi "sinergis" antar nilai-nilai dasar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hubungan Antara Nilai-nilai (Adat Istiadat) Dasar dan Komponen (Nilai Komposit) Kemajuan Bangsa menurut Tingkat Kekuatannya

Nilai-nilai (adat istiadat) dasar	Komponen nilai komposit kemajuan bangsa			
	Produktivitas/ kemandirian	Keadilan dan kehormatan	Solidaritas/ persatuan	Keberlanjutan
Rasa malu dan harga diri	+++	+++	+++	+++
Kerja keras	+++	+++	+++	+++
Rajin dan disiplin	+++	+++	+++	+++
Hidup hemat	+++	+++	+++	+++
Gandrung inovasi	+++	++	++	+++
Menghargai prestasi	+++	++	+	++
Berpikir sistematis	+++	++	+++	+++
Empati tinggi	++	++	+++	+++
Rasional/impersonal	+++	+++	++	+++
Sabar dan syukur	++	+++	+++	+++
Amanah (<i>high trust</i>)	+	++	+++	+++
Visi jangka panjang	+	++	+++	+++

Keterangan: (1) +++ = keterkaitan sangat kuat
 ++ = keterkaitan sedang
 + = keterkaitan kecil

(2) Pemuatan tanda (+) dalam tabel bersifat hipotetik dan masih perlu dikaji secara lebih kritis dan diuji secara empirik.

Hubungan antar nilai (adat istiadat) komposit kemajuan yang satu dengan yang lain juga sangat penting untuk diperhatikan. Nilai (adat istiadat) kerja keras, misalnya, harus dikaitkan dengan rasa malu dan harga diri, dan empati yang tinggi. Penerapan NSB secara parsial bisa bertentangan dengan upaya merivitalisasi adat istiadat masyarakat Indonesia Tanpa semangat *collective* dan *willingness to become a strong nation* yang didasarkan pada kematangan emosi dan kecerdasan kolektif penerapan satu NSB bisa mendistorsi kemajuan masyarakat adat dan bangsa Indonesia. Hal lain yang juga perlu diperhatikan, misalnya, tanpa penanaman nilai (adat istiadat) rasa malu yang tinggi secara kolektif mustahil nilai rasional dan impersonal bisa menjadi bagian utama yang melandasi terbentuknya kekuatan solidaritas atau persatuan antar masyarakat di Indonesia.

PENUTUP

Sebagai penutup dapat dikemukakan bahwa kekuatan suatu masyarakat adat atau bangsa bukan terletak pada budaya material, melainkan pada adat istiadat atau budaya non-materialnya. Oleh sebab itu, hal esensial yang tidak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat adat dan bangsa Indonesia harus ditempuh melalui pendekatan revitalisasi adat istiadat dan sosio budaya. Nilai komposit sosio budaya yang relevan dijadikan landasan dan visi merevitalisasi adat istiadat untuk kemajuan masyarakat adat dan bangsa Indonesia ke depan adalah kemandirian, keadilan sosial, harga diri, serta persatuan (“solidaritas”) antar masyarakat adat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dengan kata lain “nasib bangsa Indonesia” di masa datang sangat tergantung pada sejauh mana kita mampu merevitalisasi nilai adat istiadat untuk memajukan masyarakat adatnya. Kemajuan masyarakat adat pada gilirannya akan memperkokoh dan mempercepat kemajuan bangsa Indonesia secara mandiri, terhormat dan berkelanjutan. Kemampuan kita dalam merevitalisasi nilai-nilai adat istiadat dan sosio budaya perlu diarahkan pada aspek kemandirian, keadilan, harga diri, serta solidaritas antar masyarakat adat dan bangsa Indonesia sebagai soko gurunya.

Dengan semangat, semboyan dan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan gotong royong, maka (secara sosio budaya, politik, dan kenegaraan) masyarakat adat dan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari dominasi adat istiadat bangsa asing. Gotong royong merupakan kekayaan adat istiadat dan inti modal sosio budaya bangsa, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai (adat istiadat) komposit sosio budaya dari berbagai suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Revitalisasi nilai (adat istiadat), melalui pemberdayaan kelembagaan gotong royong pada masyarakat adat, akan membentuk kekuatan sinergis dalam masyarakat adat dan bangsa Indonesia. Hal ini akan terwujud melalui dinamika sosial budaya dan proses penguatan adat istiadat dalam rentang sejarah yang relatif panjang. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan (adat istiadat) gotong royong tidak saja harus dipandang sebagai bahan baku utama untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai faktor esensial untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia berbasis (atau dengan pendekatan) kekuatan adat istiadat masyarakat dan sosio budaya bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Blau, P.M. 1967. *Exchange and Power in Social Life*. John Wiley and Sons. New York.
- Chen, X. 2003. *Magic or Myth? Social Capital and Its Consequences in the Asian, Chinese, and Vietnamese Contexts*. http://www.uic.edu/depts/soci/xmchen/xmchen_social%20capita.pdf [04/11/08].
- Crough, H. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital*. In *Culture Matters: How Values Shape Human Progress* (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). Basic Books. New York.
- Grootaert, C. 1998. *Social Capital: The Missing Link? Environmentally and Socially Sustainable Development*. The World Bank.
- Harrison, E.H. 2000. *Why Culture Matters*. In *Cultures Matters: How Values Shape Human Progress* (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). Basic Books. New York.

- Huntington, S.P. 2000. Cultures Count. *in* Cultures Matters: How Values Shape Human Progress (Edited by L.E. Harrison and S.P. Huntington). Basic Books. New York.
- Korten, D.C. 1990. Strategies of Development-oriented NGOs: Four Generations. Getting to the 21st Century - Voluntary Action and The Global Agenda <http://www.caledonia.org.uk/d-korten.htm> [14/11/08]
- Mannheim, K. 1991. Ideologi and Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Montgomery, J.D. 1998. Social Capital Research Center, John F. Kennedy Center, Harvard University. Cambridge.
- Muhaimin, Y.A. 1990. Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980. LP3ES. Jakarta.
- Pranadji, T. 2003. Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 2004. Kerangka Kebijakan Sosio-Budaya Menuju Pertanian 2025: Ke Arah Pertanian Pedesaan Berdaya Saing Tinggi, Berkeadilan dan Berkelanjutan. Forum Agro Ekonomi, 22(1):1-21.
- Pranadji, T. 2005. Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3):235-255.
- Pranadji, T. 2008. Ormas dan Peningkatan Komunikasi Politik: Upaya Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Peningkatan Stabilitas Nasional di Wilayah Rawan Konflik. Makalah disampaikan pada kegiatan "Penguatan Ruang Publik Melalui Forum Dialog Kebangsaan Bagi Masyarakat di Wilayah Rawan Konflik dan Komunikasi Politik di Kalangan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik – Depdagri, 30 Oktober 2008, Hotel Mercure – Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java. University of Indonesia. Jakarta. (Disertasi).